

**RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024**



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***“Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024”*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo,

Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PROBOLINGGO



H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701030 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan 2023 Kabupaten Probolinggo (Tabel T-C 29)	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 Kabupaten Probolinggo (Tabel T-C 30)	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD...	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C 31) ..	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	24
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun (Tabel T-C 32).....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
Rumusan Rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo (Tabel T-C 33)	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Penyusunan Renja 2024 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo 2024 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2023), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01		Urusan wajib bukan pelayanan dasar								
	01	Tenaga Kerja								
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

		01	2.0 1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD	19 dokumen	19 dokumen	16 dokumen dan 1 laporan	16 dokumen dan 1 laporan	100%	16 dokumen dan 1 laporan	-	-
		01	2.0 2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Berkualitas dan tepat Waktu	35 pegawai PNS	34 pegawai PNS	34 pegawai PNS	34 pegawai PNS	100%	33 pegawai PNS	-	-
		01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
		01	2.0 8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi PD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
		01	2.0 9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras dan 1 gedung	2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras dan 1 gedung	2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras	2 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras	100%	17 unit kendaraan dinas, 3 unit sarpras	-	-
		03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja									
		03	2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan dan Uji/Sertifikasi Kompetensi	10 kali	22 pelatihan	58 pelatihan	58 pelatihan	100%	46 pelatihan	-	-

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

		03	2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	-	-	24 lembaga	24 lembaga	100%	24 lembaga	-	-
					Persentase Kapasitas Pelatihan								
		04		Program Penempatan Tenaga Kerja									
		04	2.0 1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di daerah Kab. Probolinggo	11 lokasi	1 kali monitoring, 60 peserta Binjab, 7 lokasi padat karya	10 Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 200 peserta Binjab	10 Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 200 peserta Binjab	100%	10 Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD AKL, 200 peserta Binjab dan 3 lokasi padat karya	-	-
		04	2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pelaksanaan pelayanan pasar kerja	3 kali	-	-	-	-	-	-	-
		04	2.0 5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Mekanisme Penggunaan TKA	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
		02		Program Perencanaan Tenaga Kerja									
		02	2.0 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
		05		Program Hubungan Industrial									

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

		05	2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan di Daerah Kabupaten	3 kali sosialisasi, 35 perusahaan	3 kali sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, 22 perusahaan	1 laporan	1 laporan	100%	24 laporan	-	-
		05	2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	9 kali sosialisasi, 1 paket aplikasi ketenagakerjaan, Peserta Sosialisasi Pembinaan Perusahaan	2 kali sosialisasi	-	-	-	-	-	-

Probolinggo,

Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PROBOLINGGO


H. BONDY NURHASKORO, S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701030 199003 1 002

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya			42	42.5	42.5	43	75.24	66	42.5	43	
2	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan			36	36.5	36.5	37	50	75	36.5	37	
3	Persentase Tenaga Kerja Terlatih			39.5	39.5	80	80	80	64	80	80	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

Lembar.....

dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	80 Nilai	Rp 5,429,313,872	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	80 Nilai	Rp 5,429,313,872	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu	4 Dokumen	Rp 38,349,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu	4 Dokumen	Rp 38,349,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	Rp 4,228,153,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	Rp 4,228,153,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	85%	Rp 30,555,980	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kabupaten Probolinggo	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	85%	Rp 30,555,980	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	2 Laporan	Rp 1,043,665,892	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	2 Laporan	Rp 1,043,665,892	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	6 Unit	Rp 88,590,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kabupaten Probolinggo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	6 Unit	Rp 88,590,000	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	kabupaten Probolinggo	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	36,5%	Rp 60,000,000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	kabupaten Probolinggo	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	36,5%	Rp 60,000,000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	kabupaten Probolinggo	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dokumen	Rp 60,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	kabupaten Probolinggo	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dokumen	Rp 60,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

3	Program Hubungan Industrial	kabupat en Proboli nggo	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	36,5%	Rp 253,180,500	Program Hubungan Industrial	kabupa ten Proboli nggo	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	36,5%	Rp 253,180,500	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Probolin ggo	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	100%	Rp 124,980,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Proboli nggo	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	100%	Rp 124,980,000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Probolin ggo	Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial	100%	Rp 128,200,500	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Proboli nggo	Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial	100%	Rp 128,200,500	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	kabupat en Proboli nggo	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	42,5%	Rp 622,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja	kabupa ten Proboli nggo	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	42,5%	Rp 622,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85%	Rp 102,000,000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85%	Rp 102,000,000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	15 Lembaga	Rp 60,000,000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	15 Lembaga	Rp 60,000,000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	kabupaten Probolinggo	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan	10 Informasi Pasar Kerja	Rp 320,000,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	kabupaten Probolinggo	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan	10 Informasi Pasar Kerja	Rp 320,000,000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Jumlah perlindungan PMI yang diberikan	20 Orang	Rp 110,000,000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Jumlah perlindungan PMI yang diberikan	20 Orang	Rp 110,000,000	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	85%	Rp 30,000,000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten Probolinggo	Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	85%	Rp 30,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	kabupat en Probolinggo	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja	80%	Rp 6,839,911,200	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	kabupat en Probolinggo	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja	80%	Rp 6,839,911,200	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	kabupat en Probolinggo	Jumlah peserta yang lulus pelatihan	768 Orang/Peserta	Rp 6,439,911,200	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	kabupat en Probolinggo	Jumlah peserta yang lulus pelatihan	768 Orang/Peserta	Rp 6,439,911,200	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	kabupat en Probolinggo	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi	10 Lembaga	Rp 250,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	kabupat en Probolinggo	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi	10 Lembaga	Rp 250,000,000	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	kabupat en Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	10 LPK	Rp 50,000,000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	kabupat en Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	10 LPK	Rp 50,000,000	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	kabupat en Probolinggo	Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi	85%	Rp 50,000,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	kabupat en Probolinggo	Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi	85%	Rp 50,000,000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Probolinggo	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya	100 Orang	Rp 50,000,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kabupat en Probolinggo	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya	100 Orang	Rp 50,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Probolinggo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab. Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	80 Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu	4 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Probolinggo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Probolinggo	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	85%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Probolinggo	Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	2 Laporan	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Probolinggo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	6 Unit	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Probolinggo	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	36,5%	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Probolinggo	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dokumen	
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Probolinggo	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja	80%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Probolinggo	Jumlah peserta yang lulus pelatihan	768 Orang/Peserta	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Probolinggo	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi	10 Lembaga	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	10 LPK	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Probolinggo	Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi	85%	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya	100 Orang	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Probolinggo	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	42,5%	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85%	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	15 Lembaga	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Probolinggo	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan	10 Informasi Pasar Kerja	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Jumlah perlindungan PMI yang diberikan	20 Orang	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	85%	
5	Program Hubungan Industrial	Kab. Probolinggo	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	36,5%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	100%	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Probolinggo	Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial	100%	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel T-C.33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
 Kabupaten Probolinggo
 Dinas Tenaga Kerja

Lembar....

dari....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
				Tenaga Kerja								
2.07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai LHE AKIP PD							

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu	Kab. Probolinggo	4 Dokumen	Rp 38,349,000	DAU		4 Dokumen	Rp 40,266,450
2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	Kab. Probolinggo	1 Dokumen	Rp 4,228,153,000	DAU		1 Dokumen	Rp 4,439,560,650
2.07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	Kab. Probolinggo	85%	Rp 30,555,980	DAU		85%	Rp 32,083,300
2.07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Probolinggo	2 Laporan	Rp 1,043,665,892	DAU		2 Laporan	Rp 1,095,849,185
2.07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Probolinggo	6 Unit	Rp 88,590,000	DAU		6 Unit	Rp 93,019,500

2.07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun							
2.07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Kab. Probolinggo	1 Dokumen	Rp 60,000,000	DAU		1 Dokumen	Rp 63,000,000
2.07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja							
2.07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus pelatihan	Kab. Probolinggo	768 Orang/Peserta	Rp 6,439,911,200	DBHCHT		768 Orang/Peserta	Rp 6,761,906,700
2.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi	Kab. Probolinggo	10 Lembaga	Rp 250,000,000	DAU		10 Lembaga	Rp 262,500,000
2.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	Kab. Probolinggo	10 LPK	Rp 50,000,000	DAU		10 LPK	Rp 52,500,000

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi	Kab. Probolinggo	85%	Rp 50,000,000	DAU		85%	Rp 52,500,000
2.07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya	Kab. Probolinggo	100 Orang	Rp 50,000,000	DAU		100 Orang	Rp 52,500,000
2.07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan							
2.07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kab. Probolinggo	85%	Rp 102,000,000	DAU		85%	Rp 107,099,900
2.07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan	Kab. Probolinggo	15 Lembaga	Rp 60,000,000	DAU		15 Lembaga	Rp 63,000,000
2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan	Kab. Probolinggo	10 Informasi Pasar Kerja	Rp 320,000,000	DID		10 Informasi Pasar Kerja	Rp 336,000,000

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan PMI yang diberikan	Kab. Probolinggo	20 Orang	Rp 110,000,000	DAU		20 Orang	Rp 115,500,000
2.07	04	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Kab. Probolinggo	85%	Rp 30,000,000	DAU		85%	Rp 31,500,000
2.07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak							
2.07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	Kab. Probolinggo	100%	Rp 124,980,000	DAU		100%	Rp 131,229,000
2.07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial	Kab. Probolinggo	100%	Rp 128,200,500	DAU-DID		100%	Rp 134,610,500

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

Unsur Tenaga Kerja

I. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

III Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

IV Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- Pelayanan antar Kerja
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Perluasan Kesempatan Kerja
- 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
- 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- 5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V Program Hubungan Industrial

- 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

- Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif APBD	Catatan Penting
1	2	3	4
2,07,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 5,429,313,872	
2,07,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38,349,000	
2,07,01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6,049,000	
2,07,01,2,01,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7,398,000	
2,07,01,2,01,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 6,336,000	
2,07,01,2,01,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 6,271,000	
2,07,01,2,01,06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp 12,295,000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,228,153,000	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,224,115,000	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4,038,000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 30,555,980	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,855,400	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 19,740,400	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1,081,200	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2,113,300	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4,765,680	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,043,665,892	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	142,566,138	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	901,099,754	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	88,590,000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	75,100,000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8,490,000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	5,000,000	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	60,000,000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp	60,000,000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp	30,000,000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp	30,000,000	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	6,839,911,200	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	6,439,911,200	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp	6,369,911,200	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp	50,000,000	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Rp	20,000,000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	250,000,000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	250,000,000	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp	50,000,000	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Rp	50,000,000	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp	50,000,000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp	50,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50,000,000	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	50,000,000	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	622,000,000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	102,000,000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Rp	20,050,500	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp	11,949,500	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp	20,000,000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	50,000,000	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	60,000,000.00	
2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp	320,000,000	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp	40,000,000	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Rp	250,000,000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	110,000,000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp	50,000,000	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	30,000,000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	30,000,000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Rp	253,180,500	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	124,980,000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp	50,000,000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Rp	25,000,000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp	49,980,000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	128,200,500	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	25,000,000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	28,200,500	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp	25,000,000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp	25,000,000	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp	25,000,000	

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD), dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Probolinggo,

Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PROBOLINGGO


H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

KABAG HUKUM	BAPELITBANGDA